

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

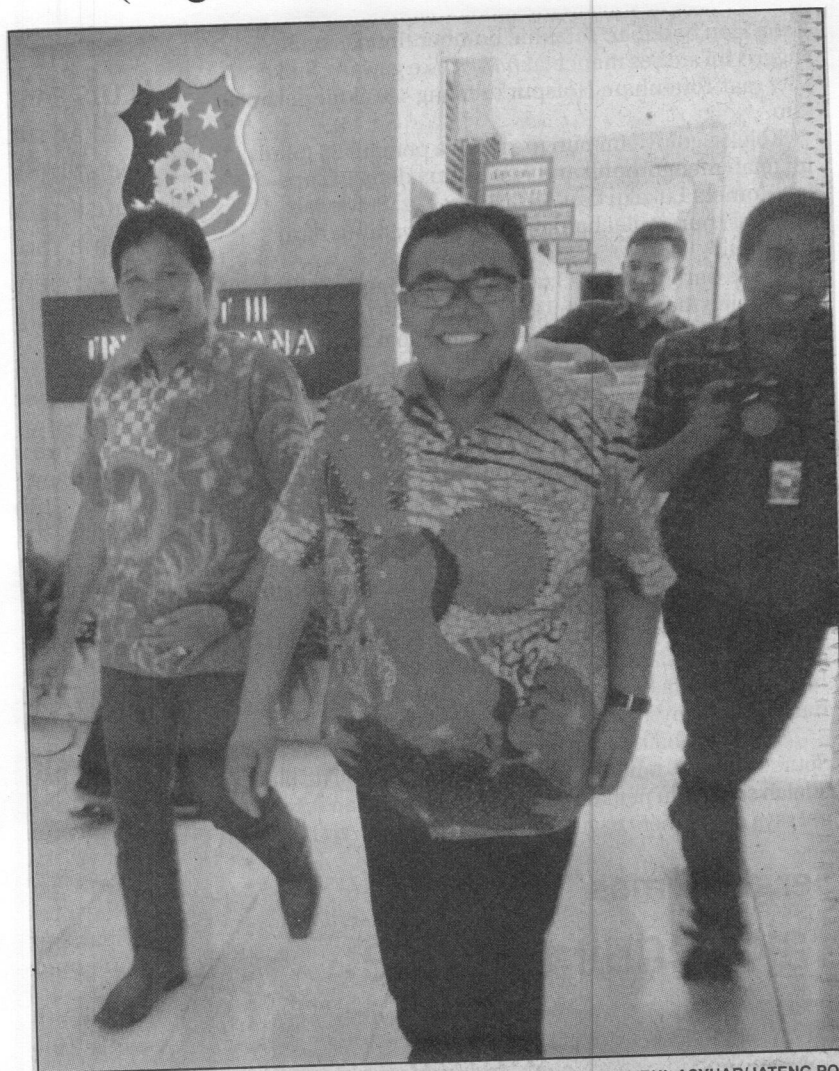
Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

## Bupati Pekalongan Digarap Polda (Dugaan Terima Suap Rp 90 Juta)



AHMAD KHOIRUL ASYHAR/JATENG POS

**DIPERIKSA:** Bupati Pekalongan Asip Kholbihi (batik kuning) saat berada di kantor Dit Reskrimsus Polda Jateng. Asip diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemotongan insentif manajerial RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

**SEMARANG** - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi diperiksa Subdit III (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jateng, Jumat (3/3). Asip diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif manajerial RSUD Kraton Pekalongan.

Terkait kasus tersebut, Asip menerima gelontoran dana mencapai Rp 90 juta. Total kerugian dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Asip tiba di kantor Dit Reskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Semarang, sekitar pukul 14.00 WIB. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut datang dengan ditemani ajudannya, Agung.

■ Baca BUPATI..hal 7

Saya dilantik bulan Juni 2016. Saya pernah menerima Rp 90 juta dalam tiga kali penerimaan. Uang tersebut sudah dikembalikan bulan Januari 2017. Jadi sempat mampir pada bulan Desember 2016. Tidak diberikan per bulan

ASIP KHOLBIH  
Bupati Pekalongan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

## Bupati Pekalongan Digarap Polda (Dugaan Terima Suap Rp 90 Juta)

### Bupati Pekalongan

dari hal 1

Setelah itu Asip langsung menjalani pemeriksaan di ruang penyidik hingga pukul 17.00 WIB.

Saat ditemui usai pemeriksaan, Asip menjelaskan pada pemeriksaan tersebut ia ditanya terkait mekanisme pengelolaan RSUD Kraton, terutama terkait kebijakan keuangan. Setidaknya ada 31 pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada Asip.

"Tidak banyak, hanya sekitar 31 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan seputar tupoksi bupati, kedudukan bupati secara struktur di badan layanan umum daerah (BLUD) terutama rumah sakit," kata Asip, sore kemarin.

Kasus dugaan pemotongan insentif manajerial RSUD Kraton tersebut terjadi pada tahun 2014-2016. Sementara Asip menjabat sebagai Bupati sejak Juni 2016. Hingga bulan Desember 2016, Asip mengaku pernah menerima uang sebanyak tiga kali dengan total Rp 90 juta.

"Saya dilantik bulan juni 2016. Saya pernah menerima Rp 90 juta dalam tiga kali penerimaan. Uang tersebut sudah dikembalikan bulan Januari 2017. Jadi sempat mampir pada bulan Desember 2016. Tidak diberikan per bulan," ujarnya.

Disinggung terkait dugaan

dana yang digunakan untuk kegiatan Muspida, Asip tidak sepenuhnya membantah. Ia menjelaskan bahwa tidak semua anggaran digunakan untuk Muspida. "Tidak semua anggaran digunakan (Muspida)," ungkapnya.

Asip juga menyebutkan, sebagai bupati baru akan menata supaya BLUD punya dasar hukum yang kuat untuk semua jenis pengelolaan. Mulai dari keuangan, pelayanan kesehatan, dan rekrutmen tenaga kerja. Kesempatan ini juga digunakan Asip sebagai momentum untuk membenahan internal.

"Ini kebijakan lama yang harus dikoreksi, sekaligus sebagai momentum untuk bersih-bersih di RSUD Kraton. Intinya siapapun yang sekarang diperiksa (terkait kasus ini) harus memberikan keterangan yang jujur. Saya bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan," tegasnya.

"Untuk saat ini sudah tidak ada lagi pemungutan insentif. Kemarin mekanisme yang salah. Saya akan melakukan pembenahan secara intensif di kraton, termasuk penggantian banyak pejabat," sambungnya.

Sementara itu, Direk-

tur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan Asip Kholbihi diperiksa penyidik sebagai saksi terkait kasus tersebut. Hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka meskipun sudah ada satu nama yang dikantongi penyidik. "Untuk penetapan tersangka belum ada, nanti kalau sudah ada hasil perhitungan dari BPK. Kalau dari hitungan penyidik kerugian mencapai Rp 5 miliar," katanya.

Pihaknya juga menegaskan akan memanggil semua pihak yang menerima uang hasil pemotongan insentif tersebut. "Kasus ini sejak tahun 2014. Kami akan periksa semua pihak yang menerima uang. Termasuk wakil Bupati Pekalongan," tegasnya.

Adapun dalam kasus ini, penyidik telah menerima uang pengembalian senilai total Rp 490 juta. Uang tersebut berasal dari mantan Bupati Pekalongan Ahmad Antono senilai Rp 400 juta dan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi senilai Rp 90 juta.

"Uang pengembalian tersebut kami sita dan dijadikan sebagai barang bukti. Barang bukti lain adalah surat keputusan insentif tahun 2014," pungkasnya. (har/udi)